

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setelah terjadi perubahan tatanan politik di Indonesia, yang populer dengan sebutan reformasi, dunia media massa mengalami perubahan mendasar. Bukan hanya terjadi peningkatan jumlah media massa —cetak dan elektronik— tapi juga secara kualitatif terjadi perubahan sifat dan keragaman isi media massa. Iklim kebebasan pers atau kebebasan media memungkinkan terjadinya perubahan mendasar itu. Pada era reformasi ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang industri media massanya berkembang dengan pesat.

Jumlah stasiun televisi yang mengudara secara nasional saat ini bertambah, dari 6 stasiun sebelum era reformasi menjadi 11 stasiun. Di samping itu, ada juga stasiun-stasiun televisi yang mengudara secara regional seperti *TVRI Stasiun Bandung*, *TVRI Stasiun Denpasar*, *TVRI Stasiun Samarinda* dan *Papua-TV*. Selain ada juga yang mengudara secara lokal seperti *J-TV*, *Programa 2 TVRI Jakarta*, *Sangatta TV*, dan *Bontang-TV*. Berdasarkan hasil penelitian Agus Sudibyo (2004: 154-157) di luar 22 stasiun regional yang dimiliki TVRI ada 48 stasiun televisi lokal baik milik swasta maupun pemerintah kota/kabupaten. Dengan demikian, saat ini setidaknya ada 81 stasiun televisi di Indonesia. Di samping itu, ada juga siaran televisi yang disalurkan hanya kepada pelangganya, yang biasa dinamakan TV kabel, yang didistribusikan melalui *Indovision*, *Telkomvision* dan *IM2*.

Sedangkan stasiun radio swasta nasional yang tadinya hanya mengudara secara lokal, beberapa di antaranya kini mengudara secara nasional melalui saluran satelit sehingga dinamakan radio satelit, seperti *Prambors* dengan *Radio-Net*-nya. Selain beberapa stasiun radio yang membentuk jaringan sehingga satu stasiun radio siarannya dapat diterima di beberapa kota seperti *Radio Elshinta*. Selain ada juga stasiun radio asing yang direlai stasiun radio lokal seperti *BBC* dan *Voice of America* (VOA). Siaran VOA pernah dipancarkan melalui stasiun televisi yang mengudara secara nasional yakni *Metro-TV* dan *Indosiar*. Tercatat ada 803 stasiun radio milik pemerintah dan swasta yang mengudara di Indonesia, yang terdiri atas 678 stasiun radio yang mengudara di jalur AM, 43 di jalur FM dan 82 di jalur SW. Namun tidak diperoleh data untuk radio komunitas yang ada di seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk media cetak, jumlah media cetak yang terbit di Indonesia tak bisa diketahui dengan pasti. Mengingat banyak media cetak —koran harian, majalah dan tabloid— yang terbitnya tidak teratur dan banyak pula yang hanya sekali dua kali terbit, setelah itu tidak terbit lagi. Keadaan ini terjadi terutama karena setelah era reformasi media cetak tidak lagi memerlukan ijin terbit. Cukup mendaftarkan perusahaan penerbitan pers itu sebagai badan usaha seperti halnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha non-pers.

Ahli komunikasi dari Universitas Indonesia S. Djuarsa Sendjaja (1993:118), melihat tiga hal yang menandai kecenderungan perkembangan media massa di Indonesia, yaitu:

- a. Pengelolaan usaha di bidang media massa tidak lagi dilakukan dalam bentuk yayasan serta semata mengutamakan aspek idealnya, tetapi berupa PT (Perseroan Terbatas) yang didukung sistem manajemen profesional dan penggunaan produk-produk teknologi canggih serta mengarah pada *komersialisme*.
- b. Semakin banyaknya para pengusaha nasional atau lazim disebut para “konglomerat” yang menanamkan modalnya di bidang usaha media massa.
- c. Media massa yang ada semakin beragam bentuknya dan mengarah pada spesialisasi.

Perkembangan itu mengubah *mediascape* Indonesia sehingga membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang hidup dalam apa yang biasa diistilahkan sebagai “dunia sesak-media” (*media-saturated world*). Media massa berubah dari “media perjuangan” menjadi “media komersial”. Menurut Goonasekera (1998:101) tipe ideal media massa di Indonesia adalah model komunitarian yang pada satu sisi menempatkan keuntungan sebagai prioritas media massa, namun pada sisi lain, media massa bersama pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, media massa di Indonesia memasuki era komersialisme seperti yang diungkapkan Sendjaja di atas.

Dari tiga kategori media, yakni media publik, media komunitas dan media komersial, yang paling pesat perkembangannya untuk media cetak dan elektronik adalah media komersial. Untuk media elektronika, media publik di Indonesia adalah TVRI dan RRI dan stasiun-stasiun radio milik kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan media publik dalam bentuk media cetak, beberapa di antaranya dikembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat seperti media Yayasan Jurnal Perempuan dan *Fit* untuk informasi kesehatan. Sedangkan untuk media komunitas, banyak yang mengambil bentuk media

elektronika khususnya radio siaran yang relatif lebih murah biaya operasionalnya. Dengan demikian, yang paling berkembang setelah era reformasi adalah media komersial dengan kecenderungan seperti dikemukakan atas.

Perkembangan media komersial seperti itu, menurut ahli komunikasi dari Universitas Airlangga Henry Subiakto (2005:3) menempatkan khalayak menjadi konsumen (*consumers*) dan bukan sebagai warga negara (*citizens*). Selanjutnya dinyatakan Subiakto (2005:3), tujuan utama media komersial adalah menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan pemegang sahamnya, dan bukan mendorong mengembangkan warga negara yang aktif. Konsekuensi dari perkembangan tersebut, media komersial mendorong khalayaknya “menikmati dirinya sendiri dan membeli produk, sehingga media massa menyajikan apa yang laku atau populer di masyarakat tanpa memperdulikan apakah hal tersebut melecehkan logika, mengacak-acak budaya, menumpulkan hati nurani, atau mengabaikan kepentingan publik” (Subiakto, 2005:3).

Dampak dari perkembangan media massa di Indonesia yang menempatkan khalayaknya sebagai konsumen dan bukan warga negara tersebut sudah mulai dirasakan anggota masyarakat. Sekarang ini, media cetak yang bernuansa pornografis sangat mudah ditemukan dan dijual dengan harga murah. Acara-acara televisi yang tidak mencerminkan keadaan keseharian semakin banyak. Seperti yang dicontoh ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, Nina Armando tentang bagaimana sekolah digambarkan dalam sinetron-sinetron remaja di televisi. Menurut Nina (dalam Jurnal Perempuan, 2004:46) sekolah,

tidak lagi digambarkan sebagai tempat belajar melainkan tempat pacaran, mengembangkan intrik, berkelahi dan pelecehan. Hal tersebut membuat sekolah menjadi institusi yang direndahkan maknanya, dan tidak berbeda dengan taman atau *mall*.

Dengan mengingat media massa memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial satu kelompok masyarakat, maka perubahan tersebut berdampak pula terhadap pengaruh yang ditimbulkan media massa terhadap masyarakat. Shirley R. Steinberg dalam kata pengantar untuk buku Toland-Frith (1997:xvi) menyebutkan salah satu dampak industri media terhadap kehidupan masyarakat adalah berkembangnya hegemoni gagasan dan agenda korporat terhadap publik. Akibatnya publik lebih mengikuti apa yang diinginkan perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan media massa tersebut, dan bukan mengikuti kebutuhan publik sendiri. Karena itu menurut Steinberg, khalayak media massa perlu diberdayakan melalui pendidikan literasi media sehingga publik mampu mengambil keputusannya sendiri tentang apa yang dikonsumsi dan bagaimana untuk mendapatkan hiburan dari media.

Pada sisi lain, berkenaan dengan perkembangan media massa di Indonesia, diundangkan dua undang-undang baru yang mengatur perikehidupan media massa di Indonesia setelah era reformasi yakni UU No. 40/1999 tentang Pers dan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Kedua undang-undang tersebut menyatakan pentingnya peran masyarakat untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan pemantauan media.

Pasal 17 (1) UU No.40/1999 tentang Pers menyatakan, "Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan". Sedangkan pada Pasal 17 (2) dinyatakan, "Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas berupa (a) memantau dan melaporkan analisis pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan pers, (b) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional". Sedangkan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, pada Pasal 52 (2) dinyatakan, "organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kalangan pendidikan dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan lembaga penyiaran". Pada penjelasan Pasal 52 (2) UU No.32/ 2002 tersebut dinyatakan, "Yang dimaksud dengan kegiatan literasi adalah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat".

Dalam konteks pengembangan literasi media dan peran masyarakat dalam mengawasi media massa itu, pada tahun 2003 beberapa lembaga pemerintah baik pada tingkat Pusat maupun Daerah Kota/Kabupaten menyelenggarakan pelatihan. Lembaga Informasi Nasional (LIN) bekerjasama dengan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) dan Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan peran dan literasi masyarakat sebagai khalayak media di ibukota-ibukota propinsi di tanah air. Pelatihan tersebut melibatkan peserta yang berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa dari berbagai jurusan dan perguruan tinggi serta aktivis organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan Persis. Pada tingkat

Kota/Kabupaten, misalnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Sumedang menyelenggarakan pelatihan yang diikuti tokoh wanita dan wakil pemuda dari setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Di samping itu, pada tahun 2004 SPS bekerja sama dengan World Association of Newspaper (WAN) menyelenggarakan Program NiE (Newspaper in Education) yang salah satu tujuannya adalah mengembangkan literasi media. Namun Program NiE di Indonesia baru pada tahap awal yakni penyelenggaraan seminar awal dan pelatihan untuk para guru. Selain Program NiE, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YAI) menyelenggarakan Program Pembelajaran Melek Media (Program PMM) bagi siswa SD dan dilaksanakan di Jakarta. Sedangkan Yayasan Jurnal Perempuan bekerja sama dengan UNICEF dan Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan sosialisasi literasi media di 5 SMU di Jakarta pada tahun 2004. Sedangkan Lembaga Konsumen Media (LKM) Surabaya menyelenggarakan pendidikan literasi media dalam bentuk pelatihan pada kelompok-kelompok masyarakat dan melalui siaran mingguan di Radio Suara Surabaya.

Pada dasarnya, apa yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut di atas merupakan upaya pembelajaran bagi khalayak media. Pembelajaran bagi khalayak media tersebut dinamai dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya sebagai *media education* (lihat, Buckingham, 1990), *paedagogy of media literacy* (Toland-Frith, 1997), *media studies* (Fedorov, 2002) dan *media literacy* (Hobbs, 1998). Namun perbedaan istilah tidak menunjukkan



substansi kegiatan yang bertujuan membuat khalayak media memiliki kompetensi yang dinamakan literasi media. Istilah *media education* dan *media literacy* sendiri merupakan dua istilah yang sering dipertukarkan penggunaannya.

Ada beberapa alasan yang mendasari arti penting pengembangan literasi media. Sepherd (2003) menyebutkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Karena kultur kita diekspresikan dan dikomunikasikan melalui media;
- b. Pentingnya mengkaji isu-isu kepemilikan, kontrol, representasi dan ideologi media;
- c. Pentingnya mendorong pergeseran fokus dari penyampaian konten media pada manajemen dan evaluasi informasi sehingga terbentuk pemikiran kritis terhadap konten media.
- d. Karena konstruksi atas realitas yang dilakukan media massa sangat penting dalam mengkaji lingkungan dan sosial.

Sedangkan menurut Steinberg (dalam Toland-Frith, 1997:xvi) pendidikan literasi media ini diperlukan untuk memampukan publik agar dalam kegiatan konsumsi barang dan jasa mampu menjadi partisipan yang cerdas. Perlunya, pendidikan media itu terkait dengan kultur konsumsi masyarakat komunikasi massa yang menempatkan pihak-pihak yang memanfaatkan media massa sebagai kekuatan untuk mengarahkan barang dan jasa yang harus dikonsumsi publik.

Sejalan dengan apa yang diuraikan Sheperd, dalam konteks keindonesiaan, Asep Saefudin (2003) meski tak menyebutkan secara langsung istilah literasi media, menyebutkan pentingnya mengevaluasi dan mengelola informasi dalam kerangka kebebasan memperoleh informasi yang dapat dijadikan alasan pentingnya literasi media sebagai berikut:



- a. Perlindungan hak-hak warga negara (*civil rights*) pada negara yang berbasis demokrasi melalui terciptanya *good governance* dan *participatory development*
- b. Perlindungan hak asasi manusia (*human rights*) melalui terciptanya jaminan akses informasi sebagai suatu hak individu yang hakiki
- c. Menjawab tantangan perekonomian global yang didominasi informasi dan pengetahuan (*knowledge-base economy*) melalui pemberdayaan masyarakat berwawasan informasi, yaitu masyarakat yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan informasi untuk peningkatan kualitas.

Sedangkan Subiakto (2005:4) melihat pentingnya literasi media dalam hubungannya dengan upaya peningkatan kualitas media. Melalui literasi media, masyarakat akan selalu kritis terhadap media massa sehingga masyarakat memiliki *bargaining position* yang kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap media. Subiakto (2005:4) menyimpulkan bahwa “tanpa *public empowering*, sulit kiranya mewujudkan sistem media yang berkualitas.” Bahkan Subiakto (2005:9) menegaskan, “Tanpa usaha meningkatkan melek media, berarti sama halnya dengan membiarkan kezaliman dan pembodohan berlangsung terus dihadapan kita.”

Dalam pandangan Guru Besar Institute of Education University of London, David Buckingham (2001), pentingnya pendidikan media untuk mencapai literasi media, adalah:

- a. Pendidikan media berkenaan dengan pendidikan tentang berbagai (*full range*) media. Tujuannya untuk mengembangkan “literasi” berbasis luas, yang tak hanya berkenaan dengan kemampuan membaca media cetak, tapi juga “membaca” sistem simbolik citra dan suara.
- b. Pendidikan media berkenaan dengan pembelajaran *tentang* media, bukan pengajaran *melalui* media.
- c. Pendidikan media bertujuan untuk mengembangkan baik pemahaman kritis maupun partisipasi aktif, sehingga memungkinkan anak muda sebagai konsumen media membuat tafsiran dan penilaian berdasarkan informasi yang diperolehnya; selain itu memungkinkan anak muda untuk menjadi produser media dengan caranya sendiri sehingga menjadi partisipan yang



swadaya di masyarakatnya. Pendidikan media adalah soal pengembangan kemampuan kritis dan kreatif anak muda.

Satu aspek penting literasi media ini adalah perubahan cara pandang terhadap media massa. Pada awalnya, literasi media dikembangkan guna *melindungi* warga masyarakat dari dampak negatif media massa. Bersama dengan sensor dan pembatasan usia khalayak media, literasi media dipandang merupakan cara untuk mengurangi dampak buruk media massa. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang membuat sensor atau kontrol negara terhadap isi media makin sulit dilakukan, maka literasi media berperan untuk mempersiapkan warga masyarakat bersentuhan atau diterpa (*exposure*) media massa. Apalagi setelah makin disadari bahwa media massa merupakan salah satu bentuk industri yang memandang khalayaknya semata sebagai konsumen sehingga perlu dipersiapkan pendidikan konsumen (lihat, Buckingham, 2001).

Oleh sebab itu, di beberapa negara, pendidikan media untuk mencapai literasi media mendapatkan perhatian yang serius. Di Inggris, pendidikan media dilakukan di seluruh Inggris bagi siswa sekolah (lihat Lederer, 2003). Di Kanada literasi media merupakan bagian dari pendidikan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah (lihat, Oberg, 1993). Di Amerika Serikat, literasi media dikembangkan kalangan perguruan tinggi seperti College of Education University of Oregon, University of New Mexico dan kalangan lembaga swadaya masyarakat seperti Medialit dan CML (lihat, Lederer, 2003) yang proses pendidikannya dilakukan melalui jalur organisasi keagamaan dan pada kelompok-kelompok masyarakat selain melalui sekolah.

Pentingnya pendidikan media/literasi media ini mendapatkan perhatian UNESCO (United Nation's Educational, Scientific and Cultural Organisation) sejak tahun 1960-an. Menurut Hobbs (1999), UNESCO berkepentingan dengan pendidikan media karena pendidikan media dipandang dapat memperbaiki ketimpangan besar antara negara-negara industri yang mengontrol pembuatan dan penyebaran produk-produk komunikasi dengan negara-negara yang terutama hanya menjadi "penerima" produk komunikasi tersebut. Memperbaiki keterampilan dalam menafsirkan dan menganalisis pesan-pesan media dipandang merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan sebagai konsumen media. Pada tanggal 22 Januari 1982, UNESCO menyelenggarakan Simposium Pendidikan Media di Grundwald Jerman (Barat). Simposium itu melahirkan Deklarasi UNESCO untuk Pendidikan Media yang dikenal dengan nama Dokumen Grundwald yang menyerukan kepada pihak-pihak berwenang untuk:

- a. Memulai dan mendorong program-program pendidikan media secara komprehensif —mulai dari tingkat pra-sekolah sampai universitas, dan pendidikan orang dewasa— yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan mendorong pengembangan kesadaran kritis, dan konsekuensinya, lahir kompetensi yang lebih besar di kalangan pengguna media cetak dan elektronik. Idealnya, program seperti ini mencakup analisa produk media, penggunaan media sebagai sarana ekspresi kreatif, serta secara efektif memanfaatkan dan berpartisipasi dalam saluran media;
- b. Mengembangkan pelatihan untuk para guru dan pelaku pendidikan (*intermediaries*) untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap media, dan melatih mereka dengan metode pengajaran yang tepat, yang memperhitungkan pemilikan pengetahuan tentang media yang masih bersifat fragmentaris pada kalangan siswa;
- c. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan manfaat pendidikan media, dalam bidang-bidang seperti psikologi, sosiologi dan ilmu komunikasi; dan

- d. Mendukung dan memperkuat tindakan-tindakan yang dilakukan dan mencerminkan pandangan UNESCO serta bertujuan untuk mendorong kerja sama internasional dalam pendidikan media.

(Deklarasi Pendidikan Media-UNESCO, 1982)

Di Asia, Menteri-menteri Pendidikan, Penerangan, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan dari 27 negara Asia yang mengikuti Asian Summit on Child Rights and the Media bersama dengan kalangan LSM, pendidik, peneliti dan profesional media pada 5 Juli 1996 menyepakati Deklarasi Asia tentang Hak-hak Anak dan Media yang antara lain meminta pemerintah, media, LSM, sektor swasta dan lembaga-lembaga lokal dan regional untuk “memberikan pendidikan media bagi anak-anak dan keluarga guna mengembangkan pemahaman kritis terhadap berbagai bentuk media” (lihat, Clearinghouse Newsletter No. 1/1997).

Pada Konferensi Wina pada 18-20 April 1999 yang diikuti 33 negara, dicapai kesepakatan untuk merekomendasikan pada tahun 2000 dan 2001 UNESCO memasukkan kegiatan pendidikan media baik pada program untuk sektor komunikasi dan sektor pendidikan (lihat, Clearinghouse Newsletter No. 2/2000).

Pentingnya literasi media ini kembali ditegaskan dalam salah satu rekomendasi dalam *White Paper* yang merupakan keputusan dan kesepakatan dalam 21<sup>st</sup> Century Literacy Summit di Berlin, Jerman pada 7-8 Maret 2002 yang diikuti kalangan pemerintah, bisnis dan akademisi dari seluruh dunia. Konferensi Tingkat Tinggi di Berlin itu menegaskan kembali bahwa literasi yang diperlukan pada abad ke-21 itu bukan lagi sekedar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung melainkan juga mencakup juga pengayaan

pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis dengan komponen-komponennya yang mencakup literasi informasi, literasi teknologi, kreatifitas media, dan tanggung jawab dan kompetensi sosial yang akan berdampak bidang pendidikan, keterampilan kerja (*workplace skills*) dan keterlibatan sebagai warga negara (*civic engagement*) (Bertelsman Foundation & AOL Time-Warner Foundation, 2002: 4-5).

Pada dasarnya, pendidikan media merupakan upaya pemberdayaan khalayak media. Hal ini sesungguhnya terkait dengan tujuan pendidikan media yang tidak lagi bertujuan melindungi khalayak media sebagai konsumen produk yang dihasilkan industri media, melainkan mempersiapkan khalayak sebagai konsumen media untuk hidup di dunia yang dunia sosialnya sangat bergantung pada media massa. Karena itu, salah satu prinsip dalam pendidikan media atau literasi media adalah memberdayakan khalayak (lihat, Masterman, 2003). Dalam pandangan Kellner (2003: 171-172), literasi media tersebut diperlukan karena kebudayaan media secara kuat mempengaruhi pandangan kita mengenai dunia, mengungkapkan pengetahuan mengenai geografi, teknologi dan lingkungan, peristiwa-peristiwa politik dan sosial, cara perekonomian berjalan, hal apa yang pada saat ini sedang berlangsung di tengah masyarakat dan dunia nyata secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, dalam pandangan Kellner (2003:180) literasi media ini dimaksudkan untuk mengembangkan demokratisasi dan partisipasi, melalui pemberdayaan khalayak media dalam berhubungan dengan media massa. Sedangkan Curry (1999) menegaskan, literasi media diperlukan untuk melindungi anak-anak (dan dewasa) dari efek buruk komunikasi massa (visual) modern.

Konsep literasi media sendiri mengalami perubahan sejak konsep ini dikembangkan pada tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an, saat UNESCO mulai mengemukakan istilah literasi media, konsep yang dikembangkan adalah upaya perlindungan (proteksi) warga masyarakat dari pengaruh buruk media massa. Pada tahun 1980-an, mulai terjadi perubahan konsep literasi media dari proteksi menjadi preparasi, sehingga kegiatan pendidikan literasi media lebih diarahkan untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk hidup di dunia sesak-media. Sedangkan pada tahun 1990-an, terjadi perubahan konsep literasi media dari pendidikan menjadi gerakan sosial. Meski literasi media dapat merupakan satu gerakan sosial terhadap media massa, namun dasar gerakan sosial tersebut adalah pendidikan literasi media.

Di Indonesia, arah pendidikan literasi media yang dikembangkan adalah mempersiapkan warga negara dalam menghadapi perkembangan media massa, khususnya perkembangan media komersial. Berbagai pelatihan literasi media yang diselenggarakan di Indonesia dimaksudkan untuk mempersiapkan warga masyarakat hidup di dunia sesak-media. Di samping itu, pengembangan literasi media di Indonesia pun diarahkan untuk mendorong perkembangan media massa agar menjalankan kebebasannya secara bertanggung jawab sekaligus mempersiapkan khalayak media massa menjadi konsumen media yang cerdas. Contohnya, seperti diberitakan harian *Kompas* (26 Agustus 2003) mengenai banyaknya tayangan mistik di stasiun televisi yang dikhawatirkan berdampak negatif pada pemirsa dan solusi yang ditawarkan adalah mengembangkan literasi media pada kalangan masyarakat Indonesia. Namun hingga kini, tingkat literasi media masyarakat Indonesia saat ini belum bisa

diketahui karena belum ada penelitian tentang hal tersebut di Indonesia (Sinansari-ecip, 2001). Selain itu kegiatan pendidikan media pun masih dilakukan secara amat terbatas untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Namun demikian, secara hipotetis dinyatakan tingkat literasi media bisa berkait dengan tingkat pendidikan, meski Sinansari-ecip sendiri menyatakan bahwa hipotesis itu masih harus diuji di berbagai tempat pada berbagai kelompok masyarakat.

Kesungguhan mengembangkan literasi media di Indonesia baru dimulai tahun 2003, sejalan dengan diundangkan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan perlunya pengembangan literasi media. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan literasi media yang bertujuan —seperti disebutkan dalam UU No. 32/2002— mengembangkan pembelajaran kritis belum menemukan bentuk baku atau bentuk ideal. Pelatihan literasi media yang dilakukan di Indonesia masih dalam taraf coba-coba dan meniru apa yang dilakukan di negara lain. Bahkan di Indonesia lebih didorong untuk mengembangkan lembaga *media watch* yang sesungguhnya mempersyaratkan para aktivis *media watch* tersebut memiliki kompetensi literasi media.

## **B. Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian**

### **1. Identifikasi Masalah**

Media massa cetak dan elektronik sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya yang berdiam di kota. Di samping memberikan dampak positif, media massa pun memberikan dampak negatif. Apalagi setelah media massa Indonesia menjadi media

massa yang berorientasi untuk meraih keuntungan. Warga masyarakat bisa dengan mudah membeli tabloid yang memuat gambar-gambar pornografis dengan harga relatif murah di berbagai kios koran. Tayangan televisi yang berbau mistik, yang menggambarkan kehidupan remaja yang tidak sejalan dengan norma-norma sosial dan agama atau tayangan yang bertentangan dengan penghargaan tinggi masyarakat terhadap profesi tertentu seperti guru. Hal ini sesungguhnya terkait dengan peran yang dijalankan media massa yang bukan merefleksikan kenyataan melainkan merepresentasikan kenyataan.

Bagaimana media massa merepresentasikan kenyataan tersebut mendapatkan peluang yang lebih besar setelah era keterbukaan dan reformasi politik dijalankan di Indonesia. Akibat dari perkembangan media massa seperti itu, masyarakat Indonesia mesti berhadapan dengan kondisi-kondisi baru sejalan dengan kebebasan media massa yang dijalankan di Indonesia saat ini. Salah satu konsekuensi dari kebebasan media massa tersebut adalah tidak ada lagi lembaga yang mengatur perijinan yang terkait dengan konten media massa dan tidak ada lagi lembaga sensor. Penyensoran atas media massa dipandang bertentangan dengan semangat kemerdekaan media. Namun media massa sendiri, karena sudah merupakan lembaga bisnis, seringkali hanya mengejar keuntungan. Tanggungjawab pengelola media massa lebih sering ditujukan pada pemilik media dibandingkan pada masyarakat yang menjadi khalayak media massa. Karena itu mesti dipersiapkan kegiatan



untuk mendidik khalayak media massa sehingga menjadi warga masyarakat yang *media literate*.

Sutaryat Trisnamansyah (2003:15) menjelaskan, salah satu pilar pendidikan sepanjang hayat adalah belajar menjadi seseorang (*learning to be*). Dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan besar yang terjadi pada abad ke-21, maka dunia pendidikan mendapatkan tantangan yang cukup besar. Dinyatakan Sutaryat (2003:15), "...masalahnya, bukan lagi mempersiapkan anak dan remaja untuk masyarakat yang sudah dikenal, tetapi harus terus-menerus memberikan kepada setiap orang kekuatan-kekuatan dan titik-titik acuan intelektual yang diperlukannya untuk memahami dunia di sekitarnya serta bertindak laku secara bertanggung jawab dan adil". Literasi media dapat dipandang sebagai salah satu upaya memberi kekuatan dan titik acuan intelektual yang diperlukan untuk memahami dunia di sekitarnya itu.

Pentingnya literasi media tersebut bukan hanya diungkapkan secara legalistik formal dalam UU No.32/2003 tentang Penyiaran, namun juga diungkapkan banyak ahli komunikasi seperti Katherina Toland-Frith dan Renee Hobbs, serta ahli dan praktisi pendidikan seperti Len Masterman dan David Buckingham. Karena saat ini media massa semakin berperan dalam kehidupan manusia maka diperlukan keterampilan baru yang dinamakan literasi media untuk bisa memanfaatkan media massa dengan baik. Literasi media bertujuan antara lain untuk mempersiapkan generasi berikut untuk hidup dalam lingkungan yang semakin dipenuhi dengan media massa. Persiapan itu diperlukan, karena media massa bukan hanya

melaporkan apa yang terjadi melainkan juga mempengaruhi khalayaknya. Bahkan, dalam melaporkan peristiwa faktual pun, media massa melakukan mediasi sehingga apa yang dilaporkan terpengaruh kepentingan media massa.

Studi yang dilakukan Sen dan Hill (2001) menunjukkan bagaimana media massa di Indonesia bukan menjalankan peran *merefleksikan* realitas melainkan *merepresentasikan* realitas. Karena tidak merefleksikan realitas namun merepresentasikan realitas, maka media di Indonesia dengan mudah menjadi alat kepentingan kekuasaan untuk merumuskan tentang realitas politik, kultural dan sosial Indonesia seperti yang dipikirkan pihak yang berkuasa dan bukan seperti yang dialami rakyat banyak.

Apa yang diungkapkan Sen dan Hill tersebut sejalan dengan kajian yang dilakukan Keith Tester (2003). Media yang pada dasarnya mengandaikan terjadinya dialog antara konten media dan khalayaknya, tapi yang sesungguhnya terjadi adalah monolog antara media dan khalayaknya. Akibatnya, khalayak media lebih banyak menerima konten media dibandingkan dengan melakukan dialog dengan konten media tersebut.

Kajian atas kehidupan media massa pada negara yang sedang mengalami masa transisi kehidupan politiknya antara lain dilakukan de Smaele (1999:173-189). Rusia yang baru berubah menjadi negara liberal demokratis dari negara komunis yang sentralistik, mengacukan model media massanya pada model media negara-negara Barat. Maka kehidupan media massa pun berubah dari media massa yang menjadi alat

negara/partai dan bertujuan propaganda menjadi media massa yang dimiliki swasta dan bertujuan komersial. Perkembangan media massa yang seperti itulah yang mendorong dibukanya program studi literasi media di beberapa perguruan tinggi di Russia (lihat, Fedorov, 2002).

Dalam konteks itulah, literasi media diperlukan. Literasi media menjadi salah satu kompetensi yang perlu dikuasai oleh setiap manusia yang menjadi khalayak atau konsumen media massa. Karena itu di beberapa negara, dikembangkan konsep kompetensi media sebagai bagian dari kompetensi personal dan kompetensi sosial (lihat, Lundgren, 2002:104). Namun di Indonesia, literasi media belum dipandang sebagai hal penting. Dalam kurikulum pendidikan ilmu komunikasi di Indonesia, literasi media baru merupakan salah satu pokok bahasan dalam satu mata kuliah. Sedangkan di LPTK, literasi media belum diajarkan. Padahal Indonesia sedang berkembang menjadi satu negara yang memiliki media massa seperti yang ada di negara-negara maju. Bahkan dalam istilah Daniel Lerner, Indonesia termasuk negara berkembang yang mengalami lompatan sejarah, yakni satu bangsa yang pertumbuhan jenis-jenis media komunikasi massanya hampir berlangsung secara bersamaan. Kesiapan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan dan perilaku untuk bersentuhan dengan media tertentu belum berkembang sudah muncul media komunikasi yang baru.

Kegiatan pelatihan literasi media di Indonesia yang bersifat nasional diselenggarakan atas kerja sama Lembaga Informasi Nasional RI, Masyarakat Pers dan Pernyiaran Indonesia (MPPI) dan Serikat Penerbit

Suratkabar (SPS) di ibu-ibu kota provinsi di Indonesia. Meski tujuan utama pelatihan ini bukan untuk mengembangkan literasi media melainkan untuk mendorong tumbuhnya *media watch* di Indonesia, namun penggiat *media watch* untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik perlu menjadi orang yang *media literate*. Pelatihan ini diikuti para mahasiswa dan dosen serta wakil-wakil dari organisasi kemasyarakatan. Sedangkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumedang diikuti para tokoh wanita dan wanita pengurus organisasi pemuda dari tiap kecamatan di Sumedang. Di samping itu, ada lembaga swadaya masyarakat yang menyelenggarakan pelatihan literasi media sebagai upaya untuk menghapus sikap dan gaya hidup konsumtif pada beberapa kalangan masyarakat. Dalam pelatihan tersebut, pada umumnya menggunakan apa yang oleh Støle (2001:1) dinamakan pendekatan konvensional yakni pelatihan yang menghadirkan pakar satu bidang untuk “menyampaikan” kepakarannya pada peserta yang menerima pembelajaran secara pasif.

Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, pelatihan literasi media yang menggunakan pendekatan konvensional dipandang mengabaikan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman warga belajar dalam mengonsumsi media massa. Konstruktivisme beranggapan bahwa (a) pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman, (b) belajar diperoleh sebagai hasil penafsiran pribadi atas pengetahuan, dan (c) belajar merupakan proses aktif yang di dalamnya dikembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman (Cherry, 2001). Sedangkan prinsip-prinsip



teoretis konstruktivisme menyatakan bahwa (a) belajar merupakan perubahan dalam pemaknaan yang dikonstruksi dari pengalaman, (b) belajar berlangsung melalui interaksi dengan orang lain, dan (c) mengkonstruksi pengetahuan dapat dipandang sebagai sebuah proses pemagangan (*apprenticeship*) (Cherry, 2001 dan Murphy, 1997).

Berbeda halnya dengan pendekatan konstruktivisme yang menekankan pada pembelajaran yang terpusat pada pembelajar (*learner-centered*) (Cherry, 2001: Murphy, 1997 dan Dougiamas, 1998), pelatihan literasi media yang diselenggarakan di Indonesia masih menggunakan pendekatan konvensional. Di Indonesia belum dikembangkan model pelatihan atau model pembelajaran literasi media yang sesuai dengan kebutuhan nyata pendidikan media untuk mencapai literasi media. Pelatihan yang diselenggarakan masih menggunakan pendekatan konvensional yang lebih menekankan pada pencapaian tujuan lembaga penyelenggara pelatihan dan kurang memperhitungkan tujuan dan kebutuhan peserta pelatihan.

Dalam pandangan Tella (1998:91), literasi media merupakan pertemuan antara ilmu pendidikan dan komunikasi massa. Karena itu, dalam mengembangkan literasi media, diperlukan pemahaman atas ilmu komunikasi, khususnya komunikasi massa dan ilmu pendidikan. Oleh karena itu, dalam disertasi ini pun dikemukakan konsep-konsep yang dikembangkan dalam ilmu komunikasi dan ilmu pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah. Prinsip-prinsip dan konsep-konsep pendidikan luar sekolah dipergunakan untuk mengembangkan model pelatihan literasi media, khususnya konsep pelatihan sebagai satuan pendidikan luar sekolah

dan konsep proses pemberdayaan yang dipergunakan untuk mencapai tingkat keberdayaan khalayak media seperti yang dirumuskan dalam kegiatan literasi media.

## 2. Fokus Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan model pelatihan literasi media bagi khalayak media massa. Namun karena secara demografis khalayak media itu sangat beragam, maka dalam penelitian ini dipilih kelompok khalayak media yang tingkat terpaan medianya (*media exposure*) tinggi yakni ibu rumah tangga yang tidak bekerja baik pada sektor formal maupun sektor informal di perkotaan. Terpaan media kelompok tersebut tinggi, karena pada umumnya ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja pada sektor formal di luar rumah atau sektor informal memiliki cukup waktu luang untuk membaca koran/majalah, menonton siaran televisi atau mendengarkan siaran radio. Sedangkan alasan yang mendasari pentingnya pelatihan literasi media bagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja adalah:

- a. Peran strategis ibu rumah tangga yang tidak bekerja sebagai salah seorang yang menjalankan peran penting dalam mendidik putra-putrinya di salah satu dari tripusat pendidikan yakni di rumah. Dengan posisi penting seperti itu, maka ibu rumah tangga diharapkan mampu menyebarluaskan pemahamannya atas literasi media pada anggota keluarga dan sesama warga masyarakat.
- b. Ibu rumah tangga yang tidak bekerja baik pada sektor formal maupun sektor informal pada umumnya memiliki waktu luang lebih banyak

sehingga sering mengisi waktunya dengan menonton televisi, mendengarkan siaran radio atau membaca koran/majalah. Karena itu, ibu rumah tangga termasuk salah satu kelompok khalayak sasaran penting bagi media massa baik media cetak maupun elektronik. Menjadi khalayak sasaran media yang penting berarti juga menjadi sasaran iklan-iklan komersial yang mendorong sikap konsumtif, sehingga diperlukan kemampuan untuk secara kritis mengkonsumsi pesan-pesan media massa seperti yang dikemukakan Toland-Frith (1997:14).

- c. Ibu rumah tangga merupakan pelaksana pendidikan keluarga yang dilakukan berbagai organisasi kaum ibu seperti PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) (lihat, Sudjana, 2000:58). Dengan demikian, pendidikan literasi media ini bisa dipandang pula sebagai bagian dari pendidikan keluarga yang bertujuan untuk memperluas dan memperkaya pengalaman anggota-anggota keluarga untuk berpartisipasi dengan terampil dalam kehidupan keluarga sebagai satu kesatuan kelompok (Sudjana, 2000:56).
- d. Media massa sendiri sering menempatkan ibu rumah tangga sebagai salah satu khalayak sasaran (*target audiences*) yang utama sehingga pengelola stasiun televisi dan radio menyiarkan acara yang khusus ditujukan pada ibu rumah tangga, media massa cetak umum secara khusus juga menyediakan rubrik bagi ibu rumah tangga, selain ada juga majalah tabloid khusus bagi ibu rumah tangga. Hal tersebut

menunjukkan bahwa ibu rumah tangga memiliki posisi penting dalam lanskap media massa.

Namun, belum adanya lembaga pendidikan yang secara khusus membelajarkan literasi media pada berbagai kalangan masyarakat seperti yang dilakukan di negara lain, membuat pesatnya perkembangan media massa dengan segala dampak positif dan negatifnya di Indonesia belum diimbangi dengan pengembangan literasi media. Indonesia belum menjadi negara yang mempersiapkan warga negaranya untuk bersentuhan dengan ketersediaan berbagai media komunikasi dan informasi. Padahal, sejak tahun 1960-an UNESCO menegaskan pentingnya pendidikan media atau literasi media ini. Berbagai simposium, konferensi atau seminar internasional dilakukan untuk mengembangkan konsep-konsep pendidikan media/literasi media khususnya untuk para pemuda di seluruh dunia. Beberapa negara sudah memanfaatkan pendidikan media/literasi media ini untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan di kalangan pemudanya.

Pengembangan literasi media melalui pelatihan memang sudah dilakukan di Indonesia. Berbeda halnya dengan konsep pelatihan yang dilakukan pada lingkungan perusahaan/instansi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja institusi dan sebagai bagian dari penjenjangan karir staf, pelatihan literasi media merupakan pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan hidup peserta didik dalam lingkungan yang makin dilingkupi media massa. Pelatihan literasi media akan lebih banyak dilakukan di lingkungan organisasi nirlaba yang merupakan wujud



keperdulian untuk mempersiapkan peserta didik dalam menjalankan perannya pada kehidupan dengan keterampilan literasi media. Oleh karena itu, fokus masalah dalam penelitian ini adalah pemberdayaan khalayak media massa melalui pengembangan model pelatihan literasi media pada ibu-ibu rumah tangga di Kota Bandung.

Pemberdayaan di sini diartikan memampukan khalayak media pada aspek-aspek yang diacukan pada pandangan pakar literasi media (Considine, 1995; Fedorov, 2002, Silverblatt, 1995; WENO, 2003) yakni memiliki kompetensi dalam:

- a. Mengakses pesan media massa
- b. Menganalisis pesan media massa
- c. Mengevaluasi pesan media massa
- d. Memproduksi pesan media massa

Kompetensi-kompetensi tersebut didasari oleh sikap dan nilai tentang pesan yang disebarluaskan media massa dan ditunjukkan dalam bentuk pilihan isi media massa yang akan dikonsumsi.

Khalayak media yang berdaya berarti memiliki kompetensi media atau disebut *media literate* setidaknya memiliki kemampuan menganalisa secara kritis pesan-pesan media, mengevaluasi sumber informasi dan membahasa isu-isu tentang bias dan kredibilitas media. Secara umum, kompetensi media sebagai salah satu bentuk kompetensi sosial yang harus dimiliki manusia yang hidup dalam dunia yang sesak-media, oleh Gapski dan Gehrke (2002) disebut sebagai "kemampuan individu untuk mengkaji media secara kritis, reflektif dan independen, serta memiliki tanggung

jawab dalam memanfaatkan media sebagai sara ekspresi kreatif dan independen.”

Pemberdayaan tersebut, seperti dinyatakan Kindervatter (1979) yang mengkaji pendidikan luar sekolah sebagai proses pemberdayaan, dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang memiliki karakteristik tertentu. Kindervatter (1979:245-246) menyebutkan karakteristik-karakteristik tersebut adalah:

- a. Struktur kelompok kecil
- b. Transfer tanggung jawab
- c. Kepemimpinan partisipan
- d. Agen sebagai fasilitator
- e. Proses dan relasi yang demokratis dan nonhierarkis
- f. Mengintegrasikan aksi dan refleksi
- g. Metode yang mendorong kemandirian
- h. Perbaikan kedudukan sosial, ekonomi dan/atau politik

Sedangkan penyelenggaraan pelatihan yang bertujuan memberdayakan khalayak media, dapat menggunakan model pelatihan yang dikembangkan Støle (2001) yang disebutnya sebagai Model Pelatihan MANCRAFT.

Model pelatihan ini memiliki dimensi-dimensi sebagai berikut:

- a. Konteks teoretis, menggunakan paduan pendekatan konvensional yang berorientasi pada penyampaian materi dan pendekatan entrepreneurial yang menekankan pada pemecahan masalah dan merespons tantangan

- b. Tujuan peserta dan program pelatihan yang mempertemukan tujuan-tujuan individu peserta dan tujuan program pelatihan sebagai tujuan keseluruhan program
- c. Pemilihan peserta dan pelatih berdasarkan kriteria tertentu
- d. Proses pendidikan, yang mencakup:
  - kepemimpinan oleh peserta pelatihan
  - Peran pelatih sebagai fasilitator
  - Peran peserta sebagai pendorong lahirnya pengetahuan dan pihak yang berbagi pengetahuan
  - Sesi pembelajaran yang fleksibel dan merespons kebutuhan
  - Menekankan pada praktik atau teori yang mengarah pada praktik
  - Terfokus pada masalah/multidisipliner
- e. Struktur pendidikan yang memadukan antara sesi pelatihan dan belajar mandiri
- f. Ketersediaan topik bahasan
- g. Penyediaan bahan ajar yang jadi pegangan bagi peserta dan pelatih
- h. Evaluasi yang diselenggarakan dengan evaluasi internal dan evaluasi eksternal
- i. Ketersediaan anggaran/dana
- j. *Marketing* program pelatihan

Berdasarkan uraian di atas, kajian dalam penelitian ini difokuskan pada:

1. Pengembangan model pelatihan literasi media sebagai upaya melindungi dan mempersiapkan warga masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang tidak bekerja pada sektor formal atau informal di

perkotaan untuk menjadi khalayak media massa yang berdaya dalam kehidupan di dunia yang sesak-media.

2. Pengembangan model pelatihan literasi media yang dapat meningkatkan keberdayaan ibu rumah tangga perkotaan sebagai khalayak media massa dengan menguasai kompetensi media.
3. Pengembangan model pelatihan literasi media yang membantu ibu rumah tangga menjadi konsumen media massa yang *media literate* dan mampu membelajarkan kembali kemampuan literasi media tersebut pada anggota keluarga dan lingkungannya.

### C. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan fokus permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *Model pelatihan literasi media yang bagaimanakah yang dapat dipergunakan untuk pemberdayaan khalayak media massa?*

Berdasarkan permasalahan umum tersebut di atas, selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai sub-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model pelatihan literasi media untuk pemberdayaan khalayak media massa yang ada dan berkembang di masyarakat, yang meliputi aspek-aspek:
  - a. Perencanaan pelatihan literasi media, yang mencakup identifikasi kebutuhan, warga belajar, dan sarana dan prasarana pelatihan.

- b. Pelaksanaan pelatihan literasi media, yaitu proses pembelajaran/interaksi edukasinya.
  - c. Evaluasi pelatihan literasi media, yang meliputi evaluasi hasil pelatihan dan evaluasi program.
2. Bagaimanakah model konseptual pelatihan literasi media untuk pemberdayaan khalayak media yang memadukan situasi alamiah dan situasi normatif pelatihan literasi media, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pelatihan?
  3. Bagaimanakah hasil uji coba model konseptual pelatihan literasi media untuk memberdayakan khalayak media melalui peningkatan kemampuan menganalisis dan mengevaluasi pesan media massa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pelatihan?

#### **D. Definisi Operasional**

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini perlu diberi batasan ruang-lingkup atas cakupannya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau menimbulkan ambiguitas makna bagi pembacanya. Konsep-konsep tersebut dalam penelitian ini diberi definisi operasional sebagai berikut:

- a. Model pelatihan literasi media merupakan satu sistem yang terdiri dari komponen-komponen sistem yang dikelompokkan menjadi komponen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan dengan mengacu pada komponen-komponen pendidikan luar sekolah (Sudjana, 2000:34). Dalam konteks model pelatihan ini, pelatihan diartikan sebagai pembelajaran yang merupakan proses manusiawi untuk mendapatkan dan mengubah

keterampilan, pengetahuan, kebiasaan dan sikap yang membawa pada perubahan perilaku (Støle, 2001:1). Sedangkan literasi media diartikan sebagai kemampuan menganalisis dan mengevaluasi pesan media massa dalam berbagai bentuknya (Fedorov, 2002; Silverblatt, 1995; Buckingham, 1990; dan WNEO, 2003)

- b. Perencanaan pelatihan diartikan sebagai proses yang sistematis ddalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada masa mendatang (lihat, Sudjana 1992:44) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan yang mengidentifikasi masukan mentah, masukan lingkungan dan masukan sarana dalam bentuk kegiatan penetapan tujuan, identifikasi kebutuhan pelatihan, peserta pelatihan, identifikasi pelatih, identifikasi sarana dan parasarana pelatihan, bahan ajar dan penyusunan perangkat evaluasi pelatihan (lihat, Sudjana 2000b:23).
- c. Pelaksanaan pelatihan diartikan proses interaksi edukasi yang dinamis antara peserta, pelatih dan materi pembelajaran dengan mengacu pada urutan kegiatan, materi, metode, teknik dan alat bantu yang telah disusun sebelumnya (lihat, Sudjana, 2000b:27)
- d. Evaluasi pelatihan diartikan sebagai upaya pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk pengambilan keputusan mengenai program pelatihan yang meliputi evaluasi proses pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan (lihat, Sudjana, 2000b:28).
- e. Pemberdayaan khalayak media massa diartikan sebagai pengembangan kemampuan untuk memilih konten media massa sesuai dengan

- kebutuhannya dan bertindak untuk mempengaruhi konten media. Sedangkan pemberdayaan sendiri dimaknai dengan peningkatan kebebasan untuk memilih dan bertindak (Narayan, 2002:14), yang di dalamnya terkandung makna kekuatan-diri, kontrol, kuasa-diri, mandiri, pilihan sendiri, hidup bermartabat sesuai dengan nilai-nilai sendiri, mampu memperjuangkan hak-haknya sendiri, independen, mengambil keputusan sendiri, bebas, sadar dan kapabel. Sedangkan khalayak media massa adalah orang yang mengkonsumsi konten media yang berbentuk teks verbal dan nonverbal (visual) yang didistribusikan melalui media massa. Adapun media massa merupakan sarana untuk mengkomunikasikan pesan dalam bentuk teks, gambar diam dan gambar bergerak, suara atau gabungan dari keseluruhan bentuk tersebut secara serentak pada sejumlah orang yang berbeda karakteristik pribadi dan status sosial-ekonominya.
- f. Model konseptual pelatihan literasi media adalah satu sistem yang komponen-komponennya dikembangkan berdasarkan situasi alamiah dan konsep-konsep teoretis dalam penyelenggaraan pelatihan literasi media. Dengan demikian, model konseptual pelatihan literasi media ini mengandung komponen-komponen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang memadukan antara pendekatan empiris dan pendekatan teoretis.
- g. Model pelatihan literasi media diartikan model pelatihan yang efektif untuk memungkinkan warga belajar menjadi manusia yang memiliki

kompetensi media sehingga menjadi khalayak media massa yang berdaya. Efektivitas model pelatihan literasi media ini dilihat berdasarkan kemampuan model tersebut dalam mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku dalam menganalisis dan mengevaluasi isi-pesan media massa. Model pelatihan ini berpusat pada pembelajar (*learner-centered*) dan menggunakan pembelajaran yang dalam prosesnya menghadapkan pembelajar pada masalah nyata keseharian dan memandang pembelajar memiliki pengalaman yang menjadi acuan bagi pemaknaan atas pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pelatihan literasi media untuk pemberdayaan khalayak media. Model pelatihan ini diharapkan menunjang efektivitas pelatihan literasi media yang diselenggarakan baik oleh institusi pemerintah seperti Lembaga Informasi Nasional, lembaga swadaya masyarakat seperti Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia dan lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan literasi media untuk masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan model tersebut diharapkan *output* dari pelatihan literasi media ini dapat mencapai kondisi seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan



Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menginginkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebebasan pers yang sehat.

Selain itu, sesuai dengan perkembangan industri media massa yang menekankan bahwa kini media massa tidak lagi bertumpu pada penyampaian pesan melainkan pesan media lebih ditentukan oleh khalayaknya, maka pemberdayaan khalayak media menjadi penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pelatihan yang merupakan proses pemberdayaan khalayak media melalui pelatihan literasi media dalam bentuk tercapainya kondisi *media-literate*.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan tujuan-tujuan antara (objektif) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model pelatihan literasi media sebagai upaya pemberdayaan khalayak media massa yang ada dan berkembang di masyarakat, yang meliputi:
  - a. Perencanaan pelatihan literasi media, yang mencakup identifikasi kebutuhan, warga belajar, dan sarana dan prasarana pelatihan.
  - b. Pelaksanaan pelatihan literasi media, yaitu proses pembelajaran/interaksi edukasinya.
  - c. Evaluasi pelatihan literasi media, yang meliputi evaluasi hasil pelatihan dan evaluasi program.
2. Untuk mengetahui model konseptual pelatihan literasi media untuk pemberdayaan khalayak media yang memadukan situasi alamiah dan situasi normatif pelatihan literasi media yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pelatihan.

3. Untuk mengetahui hasil uji-coba implementasi model konseptual pelatihan literasi media untuk pemberdayaan khalayak media yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pelatihan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang dapat memberikan manfaat baik manfaat praktis maupun manfaat teoretis berupa proposisi, prinsip atau dalil dalam bidang pendidikan luar sekolah, khususnya berkenaan dengan pelatihan literasi media yang baru dimulai di Indonesia pada awal abad ke-21 ini.

### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Memberikan sumbangan proposisi, prinsip, atau dalil dalam pendidikan luar sekolah, khususnya dalam bidang pelatihan literasi media.
- b. Memberikan sumbangan model pelatihan yang dapat dipergunakan untuk pemberdayaan khalayak media massa melalui literasi media.
- c. Memberikan sumbangan konsep dalam pelatihan untuk pengembangan literasi media yang diperlukan sejalan dengan perkembangan media massa di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menyelenggarakan pelatihan literasi media seperti yang diamanatkan Undang-undang. Lembaga Informasi Nasional (LIN) dan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk menetapkan kebijakan yang diterapkan dalam

pengembangan literasi media di Indonesia sebagai upaya mempersiapkan masyarakat Indonesia menghadapi derasnya arus informasi yang disampaikan media massa. Selain itu, diharapkan, temua penelitian ini pun memberikan masukan bagi Departemen Pendidikan Nasional untuk mempertimbangkan implementasi pelatihan literasi media sebagai bagian dari literasi baru yang dikembangkan melalui jalur pendidikan luar sekolah yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan masa depan.

- b. Memberikan masukan bagi lembaga-lembaga media massa —baik cetak maupun elektronika— yang memikul kewajiban untuk melakukan pendidikan literasi media bagi khalayaknya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan literasi media.
- c. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 52 UU No. 32/2002 tentang penyiaran yakni lembaga nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kalangan pendidik yang melakukan pendidikan literasi media bagi berbagai lapisan masyarakat.

### **G. Kerangka Konseptual**

Proses pembelajaran dalam model pelatihan yang dikembangkan Støve (2001:7) mencakup situasi pembelajaran dengan parameter sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan: Kepemilikan pembelajaran oleh peserta
- b. Peran pelatih: fasilitator/mitra pembelajar
- c. Peran peserta: Menghasilkan/berbagi pengetahuan

- d. Sesi: Fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan
- e. Penekanan: Praktis atau teori yang membawa pada praktik
- f. Fokus: Permasalahan/multidisipliner

Berdasarkan parameter situasi pembelajaran dalam pelatihan tersebut dikembangkan pendekatan-pendekatan pembelajaran sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus: menggunakan studi kasus peserta pelatihan
- b. Pendekatan mitra pembelajaran: mendorong peserta untuk saling membelajarkan
- c. Pendekatan perangkat pelatihan berganda: memadukan belajar mandiri, sesi pelatihan, kuliah, studi kasus, permainan peran, pemecahan masalah, konseling, dan diskusi interaktif
- d. Pendekatan praktis "membumi": menggunakan kasus dari peserta sendiri

Pada sisi lain, Kindervatter (1979:12-13) menyatakan bahwa dalam pendidikan luar sekolah sebagai proses pemberdayaan bukan hanya untuk penguasaan informasi dan keterampilan melainkan lebih menekankan pada pemanfaatan kapabilitas-kapabilitas tersebut untuk memecahkan masalah secara kolaboratif. Selain itu, program-programnya dirancang untuk memampukan melakukan analisa kritis atas kehidupannya sendiri dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memperbaiki relasi dan struktur sosio, ekonomi dan/atau politiknya. Karakteristik pendidikan luar sekolah yang dikemukakan Kindervatter (1979) memiliki banyak kesamaan dengan proses pembelajaran dalam pelatihan yang dikemukakan Støve di atas.

Sedangkan menurut Karcher dan Overwien (1997:52-53), pembelajaran secara informal dapat berlangsung dengan bentuk yang amat berbeda dalam



berbagai konteks dan negara yang berbeda. Karena itu tak tepat untuk mengembangkan dan menyajikan konsepsi seragam tentang pelatihan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa situasi dan kondisi sosial menentukan bentuk-bentuk pembelajaran yang dijalankan.

Menurut Boichuk (1998: 24), hal yang terpenting dalam penyelenggaraan pelatihan adalah memahami bagaimana manusia belajar. Bila cara manusia belajar sudah bisa dipahami maka bisa dirancang program pelatihan yang efektif dan efisien. Informasi yang hendak disampaikan melalui pelatihan bisa menggunakan berbagai metode penyampaian untuk membuat pembelajar bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan belajar untuk memecahkan permasalahan yang kompleks. Dengan demikian, tulis Boichuk (1998:26) para pembelajar bisa mengubah informasi yang diperolehnya menjadi pengetahuan.

Karena itu, penting sekali untuk mengetahui bagaimana cara manusia belajar sehingga bisa disusun pelatihan. Dalam pendidikan orang dewasa dikenal prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa yang pada dasarnya merupakan cara manusia untuk belajar. Menurut Malcolm Knowles (1995), karakteristik pembelajar dewasa adalah:

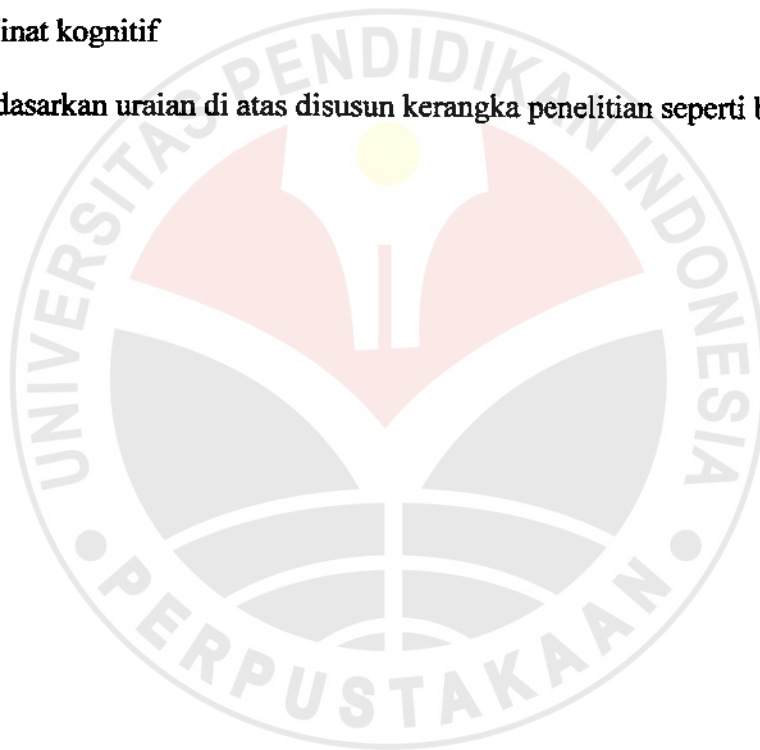
- a. Otonom dan menentukan arah belajarnya sendiri (*self directed*)
- b. Memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan
- c. Berorientasi tujuan
- d. Berorientasi pada relevansi
- e. Bersifat praktis
- f. Membutuhkan respek

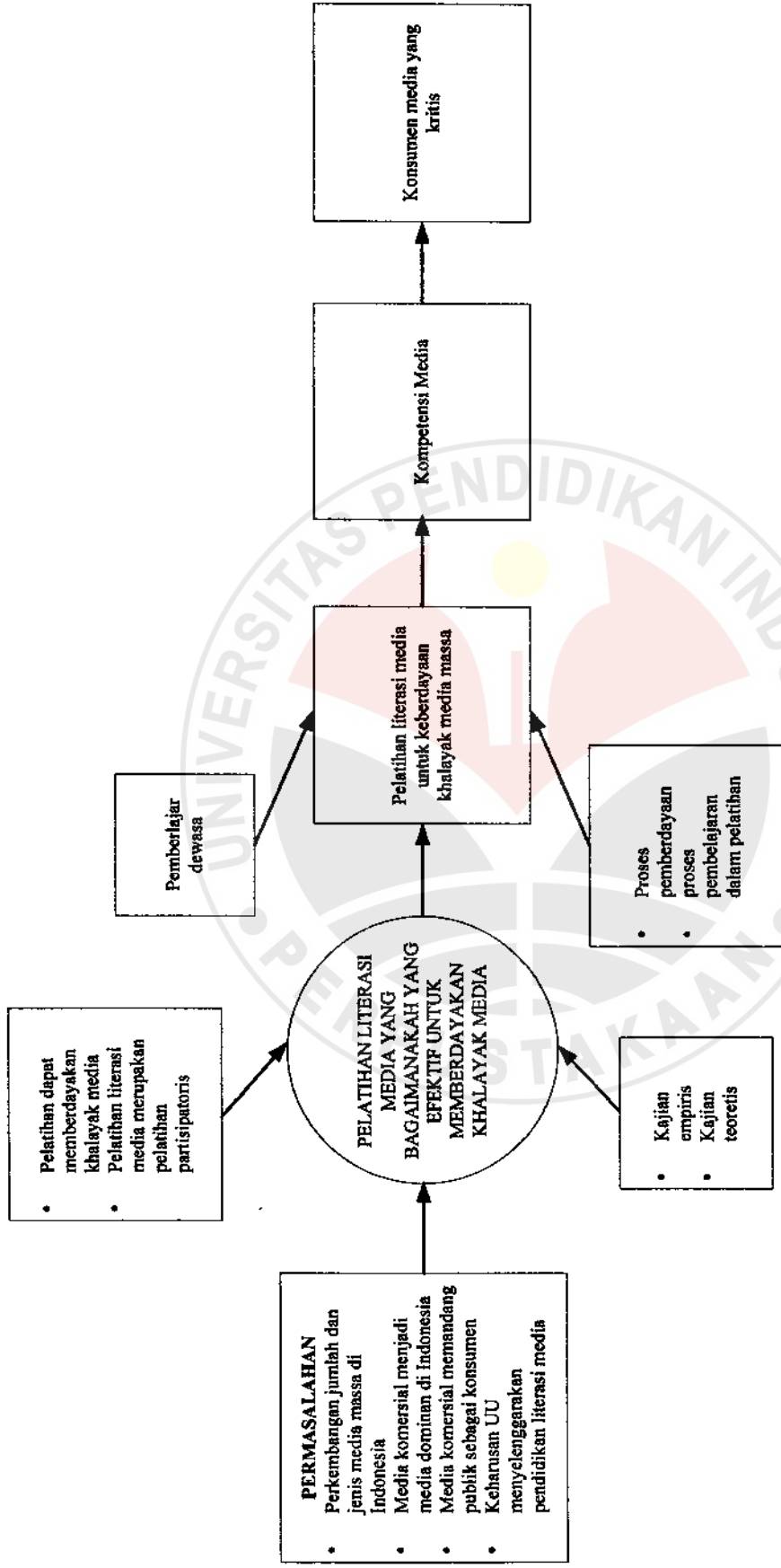
Sedangkan motivasi belajar orang dewasa ditentukan setidaknya 6 faktor,

yaitu:

- a. Relasi sosial
- b. Ekspektasi eksternal
- c. Kesejahteraan sosial
- d. Kemajuan pribadi
- e. Stimulasi
- f. Minat kognitif

Berdasarkan uraian di atas disusun kerangka penelitian seperti berikut:





Gambar 1.1. Kerangka Konseptual